

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BUMDES MITRA  
KARYA SEJAHTERA TOPAYA SELATAN, KABUPATEN BINTAN****Syafiqotur Romdoniah<sup>1)</sup>, Hurian Kamela<sup>2)</sup>**Universitas Terbuka<sup>1), 2)</sup>

Correspondence		
Email: <a href="mailto:043686206@ecampus.ut.ac.id">043686206@ecampus.ut.ac.id</a> <sup>1)</sup> <a href="mailto:hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id">hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id</a> <sup>2)</sup>		No. Telp:
Submitted: 14 Desember 2024	Accepted: 23 Desember 2024	Published: 24 Desember 2024

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pada salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Bintan yaitu BUMDes Mitra Karya Sejahtera di Desa Toapaya Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai mana akuntabilitas dan transparansi BUMDes Mitra Karya Sejahtera terhadap pihak pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Prinsip akuntabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu integritas, pengungkapan, ketaatan terhadap perundang-undang. Sedangkan transparansi menggunakan prinsip yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara dengan salah satu pengelola intinya yaitu sekretaris BUMDes Mitra Karya Sejahtera, dan wawancara dilakukan dalam waktu sekitar satu jam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Mitra Karya Sejahtera telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaannya karna sudah melakukan pelaporan dalam musyawarah desa ke pihak pemerintah desa dan masyarakat yang dilakukan setiap satu tahun sekali.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan BUMDes

**Pendahuluan**

Menurut KresnoNews, Desa sebagian besar memiliki unit usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) melalui investasi langsung dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. BUMDes bertanggung jawab untuk mengelola aset, menyediakan layanan, dan melakukan upaya lain untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa. BUMDes harus selalu mengikuti prinsip efisiensi dan efektivitas saat menjalankan operasinya sambil tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi (Pramita, 2018).

Pengelola BUMDes bertanggung jawab untuk memanfaatkan potensi desa secara optimal dan memberikan laporan atas kegiatan yang selesai dilaksanakan, meliputi laporan terkait kas keluar dan kas masuk keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, pelaksana operasional diberi wewenang untuk menyusun laporan keuangan bagi semua bidang usaha yang dikelola menggunakan metode akuntansi yang mudah praktis. Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa juga mewajibkan BUMDes menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup status keuangan dan laporan laba rugi. Laporan keuangan memiliki peran krusial untuk memastikan keselarasan antara aktivitas usaha dan potensi desa. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang krusial dalam pelaporan keuangan untuk mendukung tujuan pembentukan BUMDes. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Indonesia menekankan pentingnya penerapan kedua prinsip tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya mencegah

kecurangan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan (Monisa, 2023).

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab untuk menyampaikan laporan atau menjelaskan kinerja dan usaha yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau pemimpin organisasi kepada pihak yang berwenang untuk menerimanya. Menurut Mohammad Mahsun, akuntabilitas dapat didefinisikan dalam dua cakupan, yaitu secara luas dan sempit. Dalam konteks yang luas, akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang diberi kepercayaan (agen) untuk bertanggungjawab, melaporkan, serta menyatakan seluruh kegiatan dan tanggung jawabnya kepada pemberi kepercayaan. Akuntabilitas diwujudkan melalui laporan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga proses pertanggungjawaban, dengan tujuan mempertahankan kepercayaan publik dan mempertahankan keberlanjutan badan usaha, sekaligus mengevaluasi keberhasilan akuntabilitas organisasi layanan masyarakat.

Selain itu, transparansi juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan BUMDes. Transparansi memastikan adanya keterbukaan pada laporan keuangan yang dibuat pemerintah desa, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan memahami informasi terkait aliran dana yang dikelola. Transparansi tercermin dari kebijakan, regulasi, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat.

BUMDes bertorientasi untuk mengoptimalkan manajemen aset desa, mendukung perkembangan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, meskipun jumlah BUMDes terus meningkat secara signifikan, banyak penelitian menunjukkan bahwa tujuan awal pembentukannya belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya BUMDes yang tidak melaporkan pengelolaannya dengan baik.

### Metode Penelitian

Studi ini mengaplikasikan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berarti informasi dikumpulkan secara terstruktur dan kemudian dievaluasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Analisis yang dilakukan adalah evaluasi implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaporan keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber yang asli, seperti wawancara dan observasi. Data Sekunder ialah data yang telah didapat dari berbagai sumber yang tersedia, seperti buku, jurnal dan atau dokumen pemerintah. Penelitian ini memakai data kualitatif, yang berisi informasi, penjabaran, atau deskripsi yang sesuai.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini berada pada kantor Badan Usaha Milik Desa Mitra Karya Sejahtera, yang berlokasi Jl. Tanjung Uban Km. 18 RT. 12/IV Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi kepulauan riau. Dengan waktu Penelitian pada tanggal 4 Desember 2024.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan :

1. Wawancara

Studi ini meneliti akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera dengan pegangan yang telah dibuat melalui wawancara yang dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, setiap narasumber diberikan beberapa pertanyaan dari pegangan yang telah dibuat dan peneliti melakukan pengumpul data lalu mencatatnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyimpan catatan peristiwa yang sudah lewat. Dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk, seperti dokumen tertulis, foto, video, rekaman suara, dan data digital lainnya. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini ialah foto dan rekaman suara peneliti dan narasumber pada saat wawancara berlangsung. Dimana peneliti dan

Narasumber melakukan sesi tanya jawab mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes.

### Teknik Analisis Data

Peneitian ini menggunakan beberapa tahapan berikut ini :

1. Langkah pertama dalam operasionalisasi analisis data kualitatif penelitian ini yaitu dengan melakukan koding. Pada tahap ini berarti data lapangan sudah dikumpulkan.
2. Memproses data dari wawancara dan observasi tentang akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan milik BUMDes Mitra Karya Sejahtera.
3. Menganalisis hasil wawancara dengan narasumber pada pelaporan keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera menggunakan indikator-indikator yang mampu menunjukkan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pada pelaporan keuangannya.
4. Menguraikan mengenai BUMDes Mitra Karya Sejahtera yang menjadi bagian atau objek penelitian, data hasil wawancara, dan pengamatan laporan keuangan BUMDes dalam sebuah narasi.
5. Merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.

### Hasil dan Pembahasan

Pembentukan BUMDes bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan memotivasi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan potensi desanya, menciptakan peluang kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa. BUMDes yang mengelola sumber daya desa dan menerima dana dari desa memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitasnya kepada masyarakat dan desa. Ini memastikan bahwa pengelolaan BUMDes tetap transparan dan akuntabel.

Penelitian tersebut diuraikan dalam beberapa indikator penelitian. Ana dan Ga (2021) menggunakan metrik akuntabilitas yang mencakup integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap hukum. Untuk transparansi, Pakaya & Rorong (2019) menggunakan metrik yang meliputi keterbukaan proses, kejelasan dan kelengkapan informasi, ketersediaan serta aksesibilitas dokumen.

pengelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera, yang dipimpin oleh Bapak Aspriadi, diberi otoritas untuk melaksanakan semua fungsi pengelolaan pada BUMDes, yang terdiri dari unit usaha beberapa bidang seperti peternakan, pertanian, dan perdagangan (ecer grosir). Setiap unit yang ada harus menjalankan operasinya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Untuk memastikan bahwa BUMDes Mitra Karya Sejahtera menjalankan operasinya sesuai dengan kepentingan masyarakat, perlu dilakukan pelaporan. Rencana kegiatan, laporan

keuangan, dan laporan tahunan pertanggungjawaban adalah beberapa contoh dari berbagai bentuk pelaporan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji akuntabilitas BUMDes Mitra Karya Sejahtera dan keterbukaannya terhadap pemerintah setempat dan masyarakat mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh pihak BUMDes. Untuk menggambarkan temuan penelitian, indikator berikut digunakan:

**Tabel hasil analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan**

No	Indikator Analisis	BUMDes Mitra Karya Sejahtera
1.	<b>Akuntabilitas Keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera</b> 1. Integritas Keuangan 2. Pengungkapan 3. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓ ✗ ✗
2.	<b>Transparansi pengelolaan BUMDes Mitra Karya Sejahtera</b> 1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen 2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi 3. Keterbukaan Proses	✓ ✓ ✓

Keterangan :

✓ = sesuai

✗ = tidak sesuai

### Akuntabilitas Keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera

#### 1. Integritas Keuangan

Laporan keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera (BUMDes) harus sesuai dengan sumber-sumbernya, seperti jumlah yang tercantum pada nota transaksi, dan dideskripsikan selaras dengan kaidah akuntansi. Selain itu, laporan mesti mudah dipahami dan menunjukkan kondisi sebenarnya dari BUMDes.

Sebagai hasil dari peninjauan kami di BUMDes Mitra Karya Sejahtera, kami mendapatkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pengelola BUMDes, terutama bendahara dan admin, yang mencatat semua kegiatan transaksi, telah dibuat sesuai dengan data dan sumber daya yang tersedia.

Pengelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera dalam mencatat kegiatan transaksi yang terjadi melakukan sejumlah proses dimulai dari pencatatan tertulis atau langsung melakukan input data pada komputer dan kemudian dituangkan kedalam aplikasi akuntansi yaitu GF. Salah satu pengelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera mengatakan bahwa semua catatan kegiatan transaksi seperti nota transaksi disimpan di kantor operasional BUMDes sebagai dasar pencatatan keuangan, setelah itu laporan keuangan yang disusun disampaikan pada setiap rapat tahunan desa yang diikuti oleh pengurus desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

Kejelasan juga merupakan indikator integritas keuangan, dari hasil observasi dan wawancara terungkap sebagaimana laporan keuangan yang telah disusun oleh BUMDes Mitra Karya Sejahtera dapat dinyatakan sudah cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Didalam laporan keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera memuat psosisi keuangan dan laba rugi yang dimana itu mempermudah pihak-pihak yang bersangkutan untuk dapat dengan mudah mengerti isi laporan keuangan tersebut. Namun, laporan keuangan yang disusun atau dibuat oleh BUMDes Mitra Karya Sejahtera masih belum mencukupi dan tidak sesuai standar akuntansi yang ditetapkan yaitu SAK ETAP.

## 2. Pengungkapan

Dalam laporan keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera, yang biasanya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes dan akan disampaikan pada musyawarah desa tahunan, pengungkapan dilakukan. Laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera sederhana. BUMDes Mitra Karya Sejahtera tidak lengkap untuk kesesuaian dengan SAK ETAP karena laporan keuangan hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, lapran arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan lainnya seperti laporan perubahan ekuitas belum dimuat dalam laporan keuangan BUMDes tersebut. Jadi bisa dinyatakan bahwa laporan keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera belum bisa mencapai indikator untuk melihat pengungkapan dari laporan keuangan.

## 3. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai badan usaha yang dipegang oleh pemerintah, BUMDes harus mematuhi peraturan yang ada. Laporan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) diatur oleh Peraturan Pemerintah 11 tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Sejauh ini, BUMDes Mitra Karya Sejahtera diawasi dan dikelola oleh pemrintah desa Toapaya Selatan dari awal berdirinya hingga pelaksanaan operasinya.

BUMDes harus mengkopilasikan laporan keuangan untuk semua unit yang ada menggunakan akuntansi sederhana, dengan minimal memasukkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Karena laporan keuangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera tidak disusun sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu SAK ETAP, sehingga tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan tersebut tidak memenuhi peraturan yang berlaku.

## Transparansi pengelolaan BUMDes Mitra Karya Sejahtera

### 1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Pada BUMDes Mitra Karya Sejahtera semua dokumen mengenai laporan keuangan dan laporan lainnya disimpan di kantor BUMDes. Dokumen-dokumen tersebut diklasifikasikan sesuai waktunya. Jika pemilik kebutuhan memiliki izin dari pengelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera, dokumen yang tersedia dapat diakses. Dengan menghubungi pengelola BUMDes, masyarakat dapat langsung mengunjungi kantor dan mengisi data kunjungan sebagai bukti terdata.

Informasi mengenai pengelolaan BUMDes biasanya dibagikan melalui media sosial seperti Whatsapp dan Instagram, namun karna kebanyakan warga desa masih belum mahir menggunakan Instagram jadi pihak pengelola lebih aktif membagikan di Whatsapp. Dengan demikian, dokumen pengelolaan BUMDes Mitra Karya Sejahtera tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat jika diberi izin oleh pengelola BUMDes.

## 2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Dokumen milik BUMDes Mitra Karya Sejahtera dapat dinyatakan sudah baik. Karena dalam rapat evaluasi internal pengelolaan BUMDes setiap bulan, laporan tentang kemajuan pelaksanaan BUMDes disampaikan di sana, termasuk segala kegiatan yang telah dilaksanakan, penyelesaian masalah, pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan hasil pencapaian BUMDes. Hasil dari rapat evaluasi bulanan ini didokumentasikan. Oleh karena itu kelengkapan informasi pada BUMDes dapat dinyatakan telah lengkap, serta dapat dipahami dengan mudah.

## 3. Keterbukaan Proses

BUMDes Mitra Karya Sejahtera selalu melaporkan kegiatan yang mereka lakukan kepada pemerintah desa dan masyarakat umumnya. Dan BUMDes selalu memberikan informasi pada saat musyawarah desa yang dilakukan pada setiap akhir tahun sebagai laporan tahunan BUMDes. Saat musyawarah desa, BUMDes Mitra Karya Sejahtera menyampaikan segala bentuk dan proses yang sudah dijalankan termasuk program dan kegiatan yang sudah berjalan, anggaran atau pengeluaran yang dipakai, laba dan rugi dalam bentuk laporan keuangan dan yang lain-lain. Selain itu, BUMDes secara teratur melaporkan kegiatan mereka di akhir tahun melalui media sosial mereka, terutama grup WhatsApp.

Dalam menjalankan BUMDes sudah pasti banyak sekali masyarakat yang melontarkan pertanyaan tentang aturan dan tata cara pengelolaan BUMDes. BUMDes Mitra Karya Sejahtera belum menerapkan sistem dan prosedur operasional standar yang jelas mengenai pengaduan dan pernyataan. Sejauh ini, masyarakat yang ingin bertanya dan memberikan pengaduan dan saran bisa langsung berkomunikasi dengan pengelola BUMDes melalui media sosial seperti Whatsapp, atau langsung mengunjungi kantor BUMDes.

Karena BUMDes tidak memiliki mekanisme tetap, pertanyaan akan dikumpulkan dan dilaporkan pada evaluasi bulanan. BUMDes akan memberikan jawaban langsung kepada masyarakat yang bertanya dan melapor ke kantornya. Pada saat musyawarah desa, pertanyaan yang diajukan kepada BUMDes juga akan dijawab. Karena agenda BUMDes Mitra Karya Sejahtera akan dikomunikasikan melalui media sosial dan pihak desa, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Mitra Karya Sejahtera sudah dapat dianggap terbuka terhadap proses pengelolaan, meskipun masih ada kekurangan dalam mekanisme pengaduan untuk pertanyaan atau keluhan terkait pengelolaan.

## Kesimpulan dan Saran

BUMDes Mitra Karya Sejahtera telah menunjukkan akuntabilitas yang baik melalui pelaporan keuangan tahunan dalam musyawarah desa, seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Walaupun belum memenuhi semua persyaratan SAK ETAP. Integritas keuangan juga tercermin dari pencatatan transaksi yang rapi dan transparan, meskipun laporan keuangan yang dihasilkan masih sederhana dan terbatas. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan terlihat dari pelaporan yang rutin dilakukan kepada pemerintah desa, meskipun penyusunan laporan tersebut belum sepenuhnya sama dengan regulasi yang telah diatur dalam undang-undang.

Pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan, dengan informasi, termasuk dokumen laporan keuangan, yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat dengan izin dari pengelola. Laporan yang disusun telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap,

mencakup kegiatan unit usaha serta pencapaian yang dipaparkan dalam musyawarah desa. Proses pengelolaan juga dilaporkan secara terbuka melalui musyawarah desa tahunan dan media sosial, meskipun mekanisme pengaduan masyarakat masih belum memiliki standar yang jelas untuk memastikan respons yang terstruktur dan sistematis terhadap masukan warga.

BUMDes Mitra Karya Sejahtera disarankan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar sama dengan SAK ETAP dan regulasi yang berlaku, sehingga transparansi dan akuntabilitas semakin terjamin. Selain itu, pelatihan pengelola dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih profesional dapat membantu meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat. Untuk memperkuat keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan masyarakat sebaiknya dirancang dengan standar yang jelas, mencakup prosedur penerimaan, tindak lanjut, dan penyelesaian aduan, guna memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

### Daftar Pustaka

- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., Suryantara, A. B., & Hendri, R. S. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716-725.
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72.
- Hadi, B. (2020). *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi Apbd Desa*. Penerbitan Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK).
- Hasanah, dkk. (2021). *Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor*. Bogor : UM Jakarta Press.
- Mangindaan, J. V. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Penerbitan Unsrat Press
- Monisa, D. (2023). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bumdes Karya Mandiri Sejahtera Lopait* (Doctoral dissertation).
- Puspitasari, M., & Adi, P. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 21-41.
- Siswanto, E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Soeradi, S. (2023). *Sekilas Tentang Bum Desa*. Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Wishmilia, S. A., & Akbar, F. S. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Pacet. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1414-1426.